

**PERAN *INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION* (ILO)
MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA PADA KORBAN
WANITA DAN ANAK DI BAWAH UMUR DI NEPAL**

Oleh : Agnes Cindy Yosephine

(email: agnesyoseph123@gmail.com)

Pembimbing: Yusnarida Eka Nizmi, S.IP., M.Si

Bibliografi: 9 Jurnal, 8 Buku, 6 Dokumen Lainnya, 7 Website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

Abstract

This study looks at the role of the ILO in helping Nepal address the issue of human trafficking. The study aims to understand how international organizations can contribute to addressing this complex problem. Nepal has a high number of human trafficking victims, and if the issue is not addressed promptly, it will have a negative impact on the country.

This study was examined using the theory of the role of international organizations. The data collection process based on this research was conducted using an explanatory qualitative method. The data was mainly sourced from ILO and Nepalese government organizations providing regular contribution reports.

The study showed that the ILO plays a role in addressing human trafficking in Nepal from an international perspective without violating state sovereignty or interfering with the Nepalese government's implementation process, by initiating a number of programs such as the Decent Work Programme, Work in Freedom, the Integrated Programme on Fair Recruitment, and the Skills for Employment Project.

Keywords: ILO, Human Trafficking, Nepal, Women and Children, Migrants, Forced Labor.

PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas tentang kajian peran International Labour Organization dalam menangani kasus perdagangan manusia pada korban Wanita dan anak di bawah umur di Nepal.

Wanita dan anak pada dasarnya memiliki hak dan martabat yang melekat erat pada setiap diri manusia dan harus di junjung tinggi, seperti layaknya manusia lain pada umumnya. Namun pada kasus tertentu, wanita dan anak cenderung sangat rentan terhadap ancaman perdagangan manusia oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Kasus perdagangan manusia khususnya terhadap korban wanita dan anak tidak hanya dapat dipandang sebagai persoalan kriminalitas semata, namun kasus tersebut dapat juga dilihat sebagai suatu kasus yang menyangkut tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Nepal merupakan negara yang kaya akan keragaman kebudayaan, keagamaannya serta kaya akan sumber daya alam yang pada umumnya berasal dari hasil pertanian negara tersebut¹, namun sayangnya Nepal masih harus dihadapkan dengan sejumlah kondisi seperti kawasan Nepal yang tergolong rawan akan gempa bumi beserta berbagai bencana alam lainnya, kawasan Nepal yang juga tergolong masih sulit untuk pembangunan negaranya, serta

ketidakstabilan politik, sehingga hal tersebut menjadi penghambat bagi Nepal untuk meraih predikat sebagai negara berkembang yang sempat dinominasikan pada Desember 2020 dan dilakukan peninjauan kembali oleh komite pada tahun 2021.²

Pada dasarnya kekurangan sumber daya yang ada bukanlah isu utama dalam persoalan kemiskinan terutama yang ada di Nepal tersebut, namun yang menjadi masalah utama adalah kurang maksimalnya pemerintahan negara Nepal dalam menggunakan dan mengelola sumber daya Nepal yang ada sehingga pada akhirnya melahirkan kemiskinan, serta sejumlah tindakan dan organisasi kriminal yang berlangsung cukup lama di negara tersebut.³

Perdagangan Manusia pada umumnya dapat dikatakan sebagai suatu kekerasan dan kejahatan yang keji namun kekerasan tersebut telah dianggap sebagai kejahatan yang umum ditemukan di Nepal dan erat kaitannya dengan migrasi penyelundupan transnasional. Pada dasarnya, perilaku kejahatan perdagangan manusia yang ada di Nepal mendatangkan wanita dan perempuan di bawah umur ke rumah bordil. Saat ini kejahatan perdagangan manusia yang ada di Nepal tersebut telah berkembang menjadi sumber pemasok, atau bahkan sebagai tempat transit para korban yang tidak lagi hanya wanita

¹ Keshab Khadka. "Land and Natural Resources: Central Issues in The Peace and Democratisation Process in Nepal". Economic Journal of Development Issues Vol. 11 & 12 No. 1-2 Combined Issue. 2010. Hlm 48.

² Razzaque, Mohammad A. "Nepal's graduation from the least developed country group: Potential implications and issues for consideration". MPFD Division Working Paper. United Nations ESCAP. March 2020. Hlm 2.

³ Bala Raju Nikku et al. "Politics, Policy and Poverty in Nepal". International Journal of Social Work and Human Services Practice 3 Vol.2. No.2 Apr, 2014, pp. 1-9. Hlm 4.

namun juga para pria dan anak dibawah umur.⁴

Berdasarkan *UNICEF Report, South Asia in Action: Preventing and Responding to Child Trafficking*, mengungkapkan bahwa kebanyakan negara-negara yang ada di kawasan Asia menjadi negara tujuan, asal, dan juga sebagai negara transit dalam rantai perdagangan manusia. Berdasarkan laporan tersebut, meskipun sebagian besar korban perdagangan manusia adalah anak dibawah umur seringkali berujung menjadi korban eksploitasi seksual, terdapat juga berbagai kasus lainnya yang melibatkan korban anak dibawah umur seperti terlibat dalam, sejumlah aktivitas kriminal, menjadi pemulung secara paksa, dan bahkan eksploitasi konflik bersenjata.⁵

Berdasarkan data Kepolisian Nepal, terdapat total 1.005 kasus hukum perdagangan manusia yang telah diajukan dalam 4 tahun terakhir dengan catatan sebanyak 1.186 pelaku juga ditangkap dan 46 diantaranya adalah warga negara asing. Selanjutnya laporan terakhir yang disampaikan oleh Badan Hak Nasional Nepal pada tanggal 8 Januari 2020 bahwa terdapat 1.5 juta penduduk Nepal yang rentan menjadi korban perdagangan manusia.⁶

⁴ Sanghera, Jyoti. *"Trafficking in Nepal: Policy Analysis. An Assessment of Laws and Policies for the Prevention and Control of Trafficking in Nepal"*. The Asia Foundation. December 2020

⁵ Forum for Women, Law and Development (FWLD). (2014). *Human Trafficking and Transportation (Control) Act, 2007: Its implementation*. Kathmandu: USAID, The Asian Foundation, & FWLD.

⁶ Nepal 24 hours. "1.5 million Nepalese Vulnerable To Human Trafficking, Says Nepal's National Rights Body." <https://nepal24hours.com/1-5-million-nepalese-vulnerable-to-human-trafficking-says-nepals-national-rights-body/>. 8 Januari

Sebagian besar korban wanita dan anak perempuan yang akan diperjualbelikan secara paksa untuk menjadi pekerja seks ke beberapa negara yang hampir sama dengan kasus yang terjadi di India, yaitu akan disalurkan ke sejumlah kawasan Timur Tengah, Cina, Malaysia, Hong Kong, Korea Utara, dan Swedia. Sedangkan untuk para korban yang akan dijadikan sebagai buruh kerja secara paksa akan disalurkan ke India, Timur Tengah, Cina, Malaysia, Korea Utara, Israel, dan Amerika Serikat untuk menjadi pekerja dalam pabrik, pertambangan, pekerjaan domestik, dan bahkan juga dapat berakhir pada industri entertainment dewasa. Sebagian besar korban perdagangan manusia yang ada di Nepal diperjualbelikan oleh anggota keluarga mereka sendiri dan bahkan oleh suami mereka sendiri untuk dapat membantu perekonomian keluarga. Tercatat pada Tahun 2009, menurut narasumber yang telah diwawancarai dan tercantum di The Kathmandu Post, dikatakan bahwa terdapat sekitar 1500 pekerja dalam sehari yang meninggalkan Nepal untuk dapat bekerja diluar negeri. Serta sekitar 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang disediakan oleh pengiriman uang asing. Lalu tercatat bahwa sekitar 400.000 hingga 500.000 para pekerja migran yang meninggalkan negaranya Nepal setiap tahunnya untuk dapat bekerja di luar negeri.⁷

2020. Diakses pada 2 Oktober 2020, pukul 19.34

⁷ Kathmandu Post. "A Study – The Nepal Migration Survey by The World Bank". <http://www.ekantipur.com/the-kathmandu-post/2011/06/28/money/half-of-nepali-households-have-memberworking-abroad-survey/223411.html>. 29 June 2014. Diakses pada 2 Oktober 2020, pukul 19.20

Nepal mengalami kesulitan dalam mengatasi kasus perdagangan manusia tersebut yang pada akhirnya membutuhkan bantuan dari sektor *Intergovernmental Organization* seperti ILO (*International Labour Organization*) dan juga beberapa bantuan dari NGO lainnya. ILO merupakan suatu organisasi yang bergerak dalam melakukan sejumlah kegiatan dan upaya untuk dapat mengatasi perdagangan manusia yang akan menjadi korban perbudakan secara ilegal. ILO berupaya dengan cara menintervensi secara komunitas dan mengedukasi sejumlah wanita ataupun juga pria yang tertarik untuk bekerja di luar negeri secara aman dan legal dan bahkan juga menetapkan sejumlah peraturan baru untuk dapat mengurangi korban anak yang dibawah umur terjerumus masuk dalam perdagangan manusia yang pada akhirnya akan menjadi korban perbudakan ilegal di Nepal.

ILO sendiri merupakan sebuah IGO yang memiliki fokus, tujuan dan berdedikasi dalam menegakkan keadilan sosial serta hak asasi manusia dari tenaga kerja yang diakui secara internasional, ILO melihat bahwa keadilan sosial tersebut sangat penting untuk kedamaian secara universal dan abadi, oleh karena itulah fenomena ini memiliki landasan konsep dalam Ilmu Hubungan Internasional.

Pada tahun 2019, ILO sebagai instrument dan aktor telah melakukan suatu program dalam jangka waktu kerja 2018-2023 dan merangkul UK Department for International Development (DFID) yang merupakan sebagai salah satu anggota pendiri ILO dengan tujuan untuk dapat merangkul sekitar 350.000 wanita dan anak perempuan

diberbagai negara sumber dan juga sejumlah negara tujuan dalam kasus perdagangan manusia seperti India, Nepal, Bangladesh, dan negara lainnya. Selain itu ILO dalam program tersebut juga memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk membantu Nepal dalam menangani dan juga mencegah kerentanan para korban kerja paksa terutama pada korban wanita dan anak perempuan pada perdagangan manusia dengan cara mengarahkan para wanita dan anak perempuan ke tempat perlindungan dan memberikan sejumlah fasilitas tempat kerja yang legal pada sektor pekerjaan tekstil, pakaian kulit dan juga industri sepatu di kawasan Asia Selatan dan Arab.⁸ Dapat dilihat dalam beberapa data yang telah dipaparkan sebelumnya Kasus perdagangan manusia di Nepal sebenarnya sudah ada muncul pada tahun-tahun sebelumnya, namun kasus tersebut cenderung semakin meningkat dan juga upaya ILO dalam mengatasi kasus tersebut cenderung tidak terlalu signifikan, hingga pada tahun 2020 sejumlah korban wanita terhadap kasus perdagangan manusia di Nepal mulai berani untuk *speak up* dan menceritakan sejumlah pengalaman yang mereka hadapi ketika mereka menjadi korban di saat umur mereka yang masih sangat belia dan bahkan tidak menerima pertolongan sosial dari berbagai aspek, bahkan dari

⁸ International Labour Organization (ILO). 2019. *ILO-DFID Partnership Programme on Fair Recruitment and Decent Work for Women Migrant Workers in South Asia and the Middle East "Work in Freedom Phase II"*

keluarga dan lingkungan mereka sendiri.⁹

KERANGKA TEORI

Berdasarkan tema yang diangkat dalam penelitian ini, metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data- data primer dan sekunder.¹⁰

Perspektif yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini ialah perspektif pluralisme. Pluralisme merupakan perspektif yang menekankan perhatiannya dalam konteks isu hubungan internasional yang lebih luas dan cenderung menaruh *concern* pada isu-isu yang menyentuh kepentingan masyarakat.¹¹

Empat asumsi perspektif pluralisme, yaitu:¹² Aktor non negara adalah aktor yang penting dalam hubungan internasional; Negara bukan aktor tunggal: Negara bukan

aktor rasional; Agenda politik internasional.

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan teori organisasi internasional. Pada dasarnya konsep dari organisasi internasional adalah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk melakukan tugas-tugas yang tidak dapat dilakukan pemerintah dengan fokus utama menyelesaikan isu-isu yang terjadi pada masyarakat atau isu-isu sosial.¹³

Organisasi internasional juga merupakan suatu pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari pada struktur organisasi yang jelas, yang diharapkan dapat berfungsi secara berkesinambungan dan melembaga dalam usaha untuk mencapai tujuan yang diperlukan serta yang disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok pemerintah pada negara yang berbeda.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan Manusia di Nepal

Nepal dalam hal ini merupakan salah satu negara di dunia dengan permasalahan perdagangan manusia yang serius. *Horizons the Asia Foundation* menyebutkan bahwa masalah perdagangan manusia di Nepal sudah mencapai titik yang akut. Mayoritas kasus pun dipenuhi oleh kekerasan seksual, di mana perempuan dijadikan

⁹ Vice Staff. "Sex Trafficking: Sex Trade in Nepal". Dari

<https://www.youtube.com/watch?v=JPfLFmd4YWU&list=PLKAG5sVq-3GufirbLyAHk0vXWAmo-L0xR&index=2&t=340s>.

Diakses pada 11 Februari 2021, pukul 12.2

¹⁰ Sandu Siyoto, M.Ali Sodik "Dasar Metodologi Penelitian" Yogyakarta, Literasi MediaPublishing cetakan 1 juni 2015, halaman 11-12.

¹¹ Daniel J.Levine, David M.McCourt, "Why Does Pluralism Matter When We Study Politics? A View from Contemporary International Relations", Ameican Political Sciene Association, Vol.16, No.1, (2018), hlm 92.

¹² M. Saeri, "Teori Hubungan Internasional :Sebuah pendekatan Paradigmatik". *Jurnal Transnasional*, Vol. 3, No. 2, (Februari 2012), hlm 15-16

¹³ Klabbers, J. (2005). Two Concepts of International Organization. *International Organizations Law Review* 2, 2, 277-293.

¹⁴ Pardede, Molisa T, & Den Yealta. "Upaya World Wide Fund for Nature (WWF) Dalam Mengatasi Perdagangan Penyu Ilegal Di Provinsi Bali Tahun 2008-2013. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, vol. 2, no. 2. 2015.

komoditas seksual dalam bentuk prostitusi paksa, pornografi, pernikahan paksa dan lain-lain.

Pembagian jenis perdagangan manusia di Nepal tersebut menjadi salah satu pengaruh perdagangan manusia, terutama perdagangan perempuan di Nepal mengalami peningkatan. Data dari NHRC (*National Human Rights Commission*) Nepal menuliskan bahwa kasus perdagangan manusia yang tercatat meningkat dari 185 menjadi 305 dari catatan periode 2013-2018, meliputi perdagangan ke luar negeri juga masih banyak terjadi, seperti ke Saudi Arabia, China, Malaysia, dll dengan mayoritas korban adalah perempuan.

Jika dibandingkan dengan jumlah kasus perdagangan perempuan di Nepal yang mencapai 305 kasus, jumlah perdagangan dari Nepal ke India meningkat dari 72 kasus menjadi 607 dari catatan periode 2012-2017, setara dengan 500% jumlah perempuan yang diperdagangkan dari Nepal ke India yang terdiri 69% perempuan jika dibandingkan dengan 10% di Saudi Arabia. Perbatasan Nepal dan India juga terkenal dengan perdagangan perempuan yang juga terdiri dari remaja perempuan, di mana jalur perdagangan tersebut merupakan salah satu yang tersibuk di dunia. Diperkirakan bahwa setiap tahunnya, sekitar 5000 sampai 10.000 perempuan Nepal diperdagangkan antara Nepal dan India.¹⁵

¹⁵ Fatma Yusuf Eko Suwarno, "Perdagangan Perempuan Nepal ke India dan Peran Jejaring Feminis Transnasional", *Nation State: Journal of International Studies*, Vol. 03 No. 02 (Desember 2020), <https://jurnal.amikom.ac.id/index.php/nsjis/article/download/338/194/1718>

Selama beberapa tahun terakhir, penelitian menjadi komponen penting dalam isu perdagangan manusia di Nepal, namun data korban perdagangan manusia masih sangat bervariasi. UNICEF juga menyebutkan bahwa lebih dari 20% dari total korban terlibat menjadi pekerja seks di Nepal adalah korban yang berusia dibawah 16 tahun dan beberapa berusia 11 tahun. Demikian pula, laporan ILO mengklaim bahwa 70 dari 75 kabupaten di Nepal merupakan area yang memiliki kerentanan tinggi terhadap perdagangan manusia.¹⁶

Perempuan dan anak perempuan diperdagangkan dengan berbagai teknik tergantung pada situasinya. Sebagian besar pelaku memiliki pengetahuan mendalam tentang budaya lokal, tradisi, rumah tangga rentan untuk jalan keluar yang mudah. Berikut merupakan cara umum yang dilakukan oleh pelaku untuk melaksanakan kegiatan perdagangan manusia di Nepal:¹⁷

1. Penyalahgunaan visa perjalanan
Banyak perempuan dan gadis muda diperdagangkan oleh para pelaku atas nama bepergian ke luar negeri
2. Pernikahan palsu
Para pelaku terkadang melakukan pernikahan palsu dengan korban untuk mendapatkan

¹⁶ Sunil Kumar Joshi, "Human Trafficking in Nepal: A Rising Concern For All", *Kathmandu University Medical Journal* 08, 2010, doi: [10.3126/kumj.v8i1.3213](https://doi.org/10.3126/kumj.v8i1.3213). Hlm 3

¹⁷ Kavita Thapa, "Menace of Human Trafficking in Nepal", *International Journal of Scientific and Research Publications*, Vol. 11, Issue 8 (Edisi Agustus 2021), doi:[10.29322/IJSRP.11.08.2021.p11605](https://doi.org/10.29322/IJSRP.11.08.2021.p11605)

- kepercayaannya.
Kemudian, mereka menjualnya ke rumah bordil di India atau mengirim mereka ke negeri asing tempat mereka dieksploitasi.
3. Perdagangan beroperasi dari negara ketiga
Para pelaku beroperasi dari negara ketiga di luar Nepal. Mereka mengoperasikan jaringan perdagangan manusia atas nama peluang kerja yang menarik
 4. Penyalahgunaan media sosial
Pelaku perdagangan menargetkan calon korban menggunakan media sosial. Awalnya mereka mengirim permintaan pertemanan. Setelah permintaan pertemanan diterima, mereka akan terus mengobrol dan mencoba mendapatkan kepercayaan mereka, kemudian mereka melakukan pernikahan dan menjualnya di rumah bordil atau diperdagangkan ke negara-negara teluk.
 5. Transplantasi organ ilegal
Karena kemiskinan di Nepal, para pelaku dengan mudah menargetkan orang miskin untuk menjual ginjal mereka dengan imbalan sejumlah uang. Kadang-kadang para pelaku mengatur surat perjalanan dan perawatan medis palsu dan dengan mudah dibawa ke kota-kota India di mana transplantasi organ ilegal berlangsung,
 6. Kesempatan kerja asing
Banyak pria dan wanita muda diperdagangkan atas nama kesempatan kerja ke negeri asing. Mereka memikat korban dengan menceritakan bagaimana pekerjaan itu akan mengubah nasib dan gaya hidup mereka.
 7. Penyelesaian di negara maju
Pelaku memikat calon korban dengan menjanjikan mereka untuk membantu korban dengan menjanjikan mereka untuk membantu mereka menetap di negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dll.
 8. Keterlibatan Orang Tua atau anggota keluarga
Terkadang pelaku mencari calon korban dan langsung menghubungi orang tua atau anggota keluarga seperti saudara laki-laki, paman, bibi, saudara ipar, ipar perempuan, ibu tiri, ayah tiri atau kadang-kadang bahkan suami dan dijual kepada pelaku untuk beberapa dolar.
 9. Pemberian obat-obatan
Perempuan dan anak perempuan diperdagangkan dengan memberi mereka makanan yang dicampur dengan obat-obatan yang

membuat mereka tidak sadarkan diri dan pada saat mereka sadar, mereka sangat jauh dari negara mereka dikelilingi oleh wajah-wajah yang tidak dikenal dan orang-orang yang berbicara dalam bahasa yang berbeda yang tidak mereka kenal, kemudian mereka harus mengikuti apa yang diinginkan para pelaku dan biasanya mereka dipaksa menjadi pelacur.

10. Program budaya

Terkadang pelaku memperdagangkan gadis-gadis muda atas nama program budaya. Pada Tahun 2016-2017, Maiti, Nepal, Kantor cabang Birgunj menyelamatkan 12 gadis dari tarian orkestra di Motihari dan Begaha Bihar, India. Gadis-gadis itu pertama kali diberikan pelatihan selama satu minggu. Setelah itu mereka disuruh melakukan tarian erotis dengan tubuh telanjang. Mereka disuruh tinggal di gubuk. Kadang-kadang para pria biasa dating pada malam hari dan melecehkan mereka.

11. Pendidikan Berkualitas

Para pelaku biasanya memperdagangkan gadis-gadis muda dari daerah pedesaan atas nama memberikan pendidikan yang baik kepada mereka di kota-kota dengan mendapatkan kepercayaan dari orang tua mereka

12. Sektor hiburan

Banyak gadis atau perempuan muda diperdagangkan ke negara-negara seperti Malaysia, Tanzania, Uni Emirat Arab, Kenya, Bahrain, atas nama bekerja di bar dansa atau disko

13. Memalsukan dokumen

Pelaku perdagangan manusia memperdagangkan korban dengan cara menambah usia untuk membuat paspor dan surat keterangan kewarganegaraan anak di bawah umur serta menerbitkan passport.

Terjadinya gempa di Nepal pada tahun 2015 menyebabkan Nepal mengalami kenaikan angka perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak, dikarenakan pada keadaan yang kurang aman menyebabkan resiko-resiko keamanan mulai bermunculan, seperti anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka, keluarga jatuh miskin akibat semua aset hilang terkena bencana, keluarga tidak mampu merawat anak-anak, terutama meningkatnya kesulitan dalam mencari mata pencaharian di Nepal sehingga banyak masyarakat yang mencari peluang kerja di luar negeri.

Laporan terbaru tentang perdagangan manusia dari komisi hak asasi manusia Nepal memperkirakan bahwa sekitar 35.000 orang, termasuk 15.000 wanita dan 5.000 anak perempuan menjadi korban kejahatan perdagangan manusia pada tahun 2018 dengan tujuan eksploitasi

seksual, kerja paksa dan pengambilan organ tubuh.¹⁸

Pada tahun 2020 sendiri, Badan Hak Nasional Nepal menyatakan bahwa terdapat 1.5 juta orang Nepal rentan terhadap perdagangan manusia. Dari antara 1.5 juta orang yang rentan, 35.000 masyarakat dijual setiap tahunnya untuk terlibat dalam pekerjaan asing yang sulit dan berbahaya, hiburan dewasa dan kegiatan pekerja anak. Data Kepolisian Nepal juga menyatakan terdapat total 1.005 kasus hukum perdagangan manusia diajukan dalam 4 tahun terakhir dan dalam kasus ini, 1.176 pelaku telah ditangkap dengan 46 di antaranya adalah warga negara asing.¹⁹

Pandemi virus Covid-19 juga memberikan dampak kepada kasus-kasus perdangan manusia di Nepal. Jumlah anak perempuan dan perempuan yang diperdagangkan ke India telah meningkat secara signifikan selama pandemi. Hal tersebut terjadi karena dampak pandemi yang menyebabkan krisis keuangan dan pengangguran yang menyebabkan banyak masyarakat yang melihat kesempatan untuk

menjerat orang-orang yang putus asa mencari pekerjaan.

Keterlibatan International Labour Organization (ILO) Terhadap Kasus Perdagangan Manusia di Nepal

Kehadiran ILO yang melakukan segala upaya dalam membantu korban Wanita dan anak di Nepal bergerak sebagai organisasi independent. Walaupun demikian, ILO tetap membangun ikatan kerjasama dengan beberapa actor pemerintah atau non pemerintah lainnya dan bahkan masyarakat sipil yang memiliki tujuan yang sama dalam segala program yang dilaksanakan ILO. Pada tahun 2019, diperkirakan sekitar 17,4% masyarakat atau sekitar 5 juta masyarakat Nepal dianggap miskin dan tidak memiliki akses apapun terhadap tempat tinggal yang layak, bahan bakar memasak, nutrisi yang cukup dan juga tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Hingga pada tahun 2020, *World Bank* memperkirakan sejumlah peningkatan angka pengangguran yang meningkat sekitar 3.09% dari tahun sebelumnya.

Dengan adanya data tersebut, dapat dilihat bahwa Nepal menghadapi sejumlah permasalahan perekonomian yang cenderung tinggi dikarenakan tidak adanya suatu bidang industry yang cukup representative untuk membantu perkembangan perekonomian berkelanjutan di Nepal. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor penyebab Nepal sangat sulit mendapatkan sejumlah investasi asing berkelanjutan untuk perkembangan pembangunan, namun di satu sisi juga Nepal harus tetap bergantung kepada

¹⁸ United Nations Office on Drugs and Crime, "Nepal Takes a Step Forward Against Human Trafficking", <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/Webstories2020/nepal-takes-a-step-forward-against-human-trafficking.html>. Diakses pada 24 Maret 2022.

¹⁹ Business & Human Rights Resource Centre, "Nepal: Over 5% of Nepal's Population Are Highly Vulnerable to Human Trafficking, National Rights Body Says", 07 Januari 2020, <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/nepal-over-5-of-nepals-population-are-highly-vulnerable-to-human-trafficking-national-rights-body-says/>. Diakses pada 24 Maret 2022

negara lain untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Sebagai aktor independen dalam menjalankan upaya untuk membantu Nepal dalam memberantas perdagangan manusia, ILO juga tidak luput dalam membantu dan memberikan kontribusi nya terhadap bidang perekonomian di Nepal yang di sebabkan oleh permasalahan perekonomian juga menjadi salah satu faktor penyebab penting terjadi nya perdagangan manusia.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, berikut merupakan beberapa bentuk peran ILO dalam bekerjasama dan membantu mengatasi kasus perdagangan manusia di Nepal pada tahun 2018-2020:

1. Policy Drafting Recommendation

ILO telah memberikan beberapa rekomendasi-rekomendasi untuk mengatasi asumsi yang salah mengenai perdagangan manusia dengan tujuan menciptakan landasan atau kebijakan yang efektif dalam memberantas perdagangan manusia di Nepal²⁰ yaitu yang pertama adalah pertanggungjawaban administrasi ketenagakerjaan yang kuat oleh pemberi pekerjaan untuk memastikan lingkungan kerja yang layak di seluruh bidang dan kelas pekerjaan, kedua pemberitahuan kebijakan perekrutan tenaga kerja yang jelas dan akurat kepada calon pekerja secara menyeluruh agar pekerja dapat mengetahui secara pasti mengenai kondisi kerja dan kehidupan sehari-hari, ketiga pemberlakuan analisis resiko geografis social ekonomi dalam permasalahan pekerjaan paksa, keempat ratifikasi kebijakan yang memiliki fokus terhadap pengurangan resiko pekerjaan, kelima kebijakan

dalam menangani diskriminasi yang ada pada bidang pekerjaan apapun, keenam semua tenaga kerja harus memiliki hak tenaga kerja yang sesuai dengan kehidupan yang layak, ketujuh analisis kekurangan yang di dapat dari kebijakan terdahulu, kedelapan kebijakan ekonomi yang menciptakan pekerjaan yang layak dan mengurangi resiko fisik yang dapat mendukung standar ketenagakerjaan internasional dan jaminan social yang mendukung hak-hak buruh migran, kesembilan menetapkan prioritas terhadap perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi perdagangan manusia menjadi tanggungjawab semua pengambil keputusan, dan yang terakhir adalah peningkatan kerjasama antara pemerintah dan aktor lainnya untuk perlindungan hukum migran dan membantu mengambil tindakan efektif.

2. Decent Work Programme for Nepal

Decent work programme sendiri lahir dari definisi ILO mengenai pekerjaan yang layak di dapat oleh semua masyarakat, terutama dalam aspek pekerjaan produktif bagi perempuan dan laki-laki dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, keamanan dan martabat manusia Secara umum, pekerjaan dianggap layak jika menjamin bentuk pekerjaan yang aman dan kondisi kerja yang aman, memberikan penghasilan yang adil, menjamin bentuk pekerjaan yang aman dan kondisi kerja yang aman, memastikan kesempatan dan perlakuan yang sama untuk semua, termasuk perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya, dan menawarkan prospek untuk pengembangan pribadi dan mendorong integrasi social pekerja bebas untuk mengungkapkan keprihatinan mereka dan untuk

²⁰ ILO. “*Common Myths and Facts About Domestic Work*”, ILO Regional Office for Arab States, 2019.

berorganisasi²¹. *Decent Work Country Programs* (DWCPs) juga menjadi sarana utama untuk memberikan dukungan ILO kepada negara-negara anggota. DWCP mewakili kerangka kerja perencanaan jangka menengah yang memandu pekerjaan ILO di suatu negara sesuai dengan prioritas dan tujuan yang disepakati dengan pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. DWCP juga penting untuk memposisikan ILO di tingkat nasional dalam kerangka perencanaan PBB, seperti UNDAF (Dana Bantuan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa), dan untuk berkontribusi pada pencapaian SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).²² DWCP untuk Nepal (2018-2022), dirancang sangat selaras dengan prioritas pembangunan Nepal. Hal ini juga mencerminkan prioritas yang ditetapkan dalam Kerangka Kerja Bantuan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDAF) untuk 2018-2022. dan secara signifikan berkontribusi pada Prioritas Satu UNDAF tentang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dan terkait ke Prioritas Dua pada pembangunan sosial.

Sejak tahun 2014, ILO juga telah meluncurkan “Fair Recruitment Initiative” yang bertujuan untuk mendorong keadilan praktik perekrutan tenaga kerja yang adil dan melindungi hak-hak pekerja migran. Di Nepal sendiri, program ini telah meningkatkan praktik perekrutan yang

adil bagi para migran dari Nepal di Yordania, mendukung proses perekrutan menuju tujuan utama bagi pekerja Nepal, terlibat dengan industri perekrutan di Nepal dan juga menghilangkan praktik rekrutmen yang menipu dan memaksa, mengurangi resiko pekerja migran menjadi korban perdagangan manusia. FAIR sendiri telah memberikan hasil untuk mempromosikan prinsip-prinsip perekrutan yang adil dan kemudian menghasilkan prinsip dan panduan operasional rekrutmen yang adil, mengembangkan dan mempromosikan program pelatihan keterampilan khusus yang memenuhi persyaratan standar perburuhan internasional dan pabrik, dan mengidentifikasi serta membangun kapasitas agen tenaga kerja swasta untuk menghormati hak manusia.

SIMPULAN

Pada dasarnya, ILO sebagai organisasi internasional tetap memiliki keterbatasan dalam penyelesaian suatu permasalahan pada negara berdaulat yang dalam penulisan ini adalah Nepal. ILO hanya dapat terlibat dalam proses pendampingan dan pengawasan dan kemitraan dalam mengatasi dan memberantas kasus perdagangan manusia di Nepal, namun pada sejatinya, wewenang pengambilan keputusan dan pelaksanaan tertinggi tetap dipegang oleh pemerintah Nepal sendiri.

Isu perdagangan manusia di Nepal sendiri masih memiliki banyak sekali hambatan dan faktor penyebab yang sangat kompleks, terutama dalam hal pemantauan dan

²¹ “What is Decent Work”, diakses pada 18 Juni 2022, https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/sustainable-growth-and-jobs/employment-and-decent-work_en

²² “Decent Work Country Programmes”, diakses pada 20 Juni 2022, <https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/decent-work-country-programmes/lang-en/index.htm>

pencatatan kasus yang sebenarnya terjadi di lapangan. Fenomena gunung es dalam permasalahan perdagangan manusia ini menyebabkan isu ini memang segera harus diatasi, karena jika tidak maka isu ini dapat semakin menyebar lebih luas dan memberikan dampak yang jauh lebih besar daripada yang sudah terjadi saat ini.

Perdagangan manusia yang menargetkan perempuan dan anak di Nepal mendapatkan tekanan internasional untuk segera diatasi. Aktivitas ini berkaitan erat dengan kaum masyarakat dengan perekonomian yang sulit dan juga Pendidikan yang rendah sebab kelompok tersebut merupakan target utama yang sangat mudah terkena umpan dari pelaku aktivitas ini. Terlebih bisnis perdagangan manusia yang terjadi di Nepal sudah termasuk dalam kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk dicari pemegang utamanya. Metode operasi perdangan manusia yang dilaksanakan dengan terorganisir juga mempersulit proses penyelidikan kasus perdagangan manusia yang kemudian mempersulit proses hukum.

ILO sebagai salah satu aktor internasional yang berkontribusi dalam membantu Nepal mengatasi isu perdagangan manusia, berperan sebagai actor yang bekerja selaras dengan pemerintah Nepal melalui kerja sama dengan pihak pemerintah dalam proses pembuatan pedoman dan panduan dalam menangani isu perdagangan manusia dengan tujuan agar segala kontribusi yang dilaksanakan dapat terlaksana secara maksimal dengan adanya kontribusi langsung dari pemerintah Nepal.

Respon pemerintah Nepal terhadap tekanan dan pengaruh dari system internasional sudah

dilaksanakan dengan melakukan instrument hukum, kemitraan, kampanye dan kontribusi lainnya, namun hal-hal tersebut cenderung bersifat probelmatik dan memiliki celah untuk dilalui para pelaku perdagangan manusia. Hal ini dibuktikan dengan data statistic terkait perdagangan manusia yang masih tinggi dan peningkatan pelaku criminal yang terlibat dalam permasalahan perdagangan manusia di Nepal. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa respon pemerintah Nepal masih cenderung pasif dan perhatian negara tidak bisa hanya di fokuskan pada isu perdagnagan manusia ini saja karena terdapat banyak permasalahan lain yang harus di atasi oleh pemerintah Nepal hingga saat ini.

Pandemi *covid-19* yang melanda seluruh negara pada tahun 2020 lalu juga memberikan dorongan yang sangat kuat kepada peningkatan perdagangan manusia. Perekonomian Nepal yang sudah sulit menjadi semakin sulit setelah *Covid-19* menyerang dan hal ini menyebabkan perluasan kelompok-kelompok yang sangat rentan menjadi korban perdagangan manusia. Bisnis perdagangan manusia juga terlihat menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan dan menjanjikan yang kemudian menarik pelaku untuk semakin gencar dalam melaksanakan kejahatan ini.

Melihat bagaimana keadaan yang disebabkan perdagangan manusia baik kepada aspek sosial dan juga aspek negara, ILO sudah memberikan kontribusi-kontribusi yang banyak dan membantu sekali bagi Nepal sendiri. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan keberhasilan-keberhasilan yang sudah dicapai ILO selama

memberikan kontribusi nya kepada Nepal.

Pada akhirnya, tidak dapat dipungkiri bahwa hambatan-hambatan yang menyebabkan permasalahan perdagangan manusia di Nepal masih sangat sulit untuk diberantas secara penuh karena berbagai keterbatasan dan keadaan yang terjadi. Hal tersebut menyebabkan kontribusi dan peran yang diberikan ILO kepada Nepal dalam memberantas perdagangan manusia masih memiliki perjalanan panjang untuk benar-benar mencapai keberhasilan mutlak.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Keshab Khadka. (2010). "Land and Natural Resources: Central Issues in The Peace and Democratisation Process in Nepal." *Economic Journal of Development Issues* vol. 11 &12, no. 1-2, Combined Issue
- Nikku, Bala. (2014). "Politics, Policy and Poverty in Nepal." *International Journal of Social Work and Human Services Practice* 3 Vol.2. No.2
- Forsythe, David P. (2017). "Human Rights in International Relations". *Cambridge University Press*. Vol. 1, No.1.
- M. Saeri. (2012). 'Teori Hubungan Internasional Sebuah pendekatan Paradigmatik." *Jurnal Transnasional*, Vol. 3, No. 2.
- Kumar, Bal. (2001). "Trafficking in Girls with Special Reference to Prostitution: A Rapid Assessment", *International*

Labour Organization Journal, no.2.

- Rahaman, Md. (2015). "Human Trafficking in South Asia (Special Preferences on Bangladesh, India and Nepal): A Human Rights Perspective", *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 20, Issue 3.
- Allain, Jean. (2017). "White Slave Traffic in International Law". *Journal of Trafficking and Human Exploitation*, vol. 1.
- Joshi, SK. (2010). "Human Trafficking in Nepal: A Rising Concern for All", *Kathmandu University Medical Journal*, Vol.8, No.1, Issue 29.
- Khanal, Shushant. (2020). "Human Trafficking in Nepal: Can Big Data Help?", *Undergraduate Research Journal*, Vol. 24, Article 5.

Buku

- Weber, Martin. *Constuctivism and Critical Theory*. Cambridge: Cambridge University Press. 2007.
- Archer, Clive. *International Organization*. London: Routledge. 2001.
- Buzan, Barry. *People, States & Fear*. Sussex: Wheatsheaf Books. 1983.
- Mohammad Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Ibnu Siina Research Institute. 2012.
- Sugeng, Bob Hadiwinata. *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivitas*. Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2017.

Mustari, Mohamad, Ph.D dan M.Taufiq Rahman, Ph.D. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. 2012.

Foundation, Asia. *Prevention of Trafficking and The Care and Support of Trafficked Persons*. New Delhi: Horizon Project Population Council. 2001.

Hanjabam, Shukhdeba Sharma. *Child Trafficking in The Indo-Myanmar Region*. New Delhi: Concept Publishing Company. 2020.

Dokumen Lainnya

Forum for Women, Law and Development (FWLD). (2014). *Human Trafficking and Transportation (Control) Act, 2007: Its implementation*. Kathmandu: USAID, The Asian Foundation, & FWLD.

Child Rights Resource Center. (2013.) *The Global Slavery Index Report*. Walk Free Foundation.

Lamy, Steven L. (2001). *Contemporary Mainstream Approaches Neo-Realism and Neo-Liberalism*. PhilPapers.

Roisin Stallard. (2013). *Child Trafficking in Nepal: Causes and Consequences*. Child Reach International

Mohammad A. Razzaque. (2020). *Nepal's graduation from the least developed country group: Potential implications and issues for consideration*. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

Pragya. (2015). *Trafficking of Women and Girls in Nepal*.

Website

United Nations Office on Drugs and Crime. “*What is human trafficking?*”

<http://www.unodc.org/unodc/en/humantrafficking/what-is-human-trafficking.html>. Diakses pada 27 September 27, 2020, pukul 11.29

Von Lampe, K., Van Dijck, M., Hornsby, R., Markina, A., & Verpoest, K. (2006). *Organised Crime is...: Findings from a cross-national review of literature*. Dalam P. Duyne, & A. Maljevic

International Labour Organization. www.ilo.org. Diakses pada 27 September 27, 2020, pukul 11.55

Definisi Dari Organisasi Menurut Ahli”, dalam [http://teori-organisasi-umum-](http://teori-organisasi-umum-1.blogspot.co.id/2013/05/definisi-dari-organisasi-menurut-10.html)

[1.blogspot.co.id/2013/05/definisi-dari-organisasi-menurut-10.html](http://teori-organisasi-umum-1.blogspot.co.id/2013/05/definisi-dari-organisasi-menurut-10.html), diakses pada 27 September 27, 2020, pukul 12.15

Mudja Rahardjo, *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif*, 2010. Diakses Pada 23 September, <https://www.uin-malang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html>

ID Tesis, *Pengertian dan jenis metode deskriptif*, Diakses pada 23 September, <https://idtesis.com/metode-deskriptif/>

Vice Staff. “*Sex Trafficking: Sex Trade in Nepal*”. Dari <https://www.youtube.com/watch?v=JPfLFmd4YWU&list=PLKAG5sVq-3GufirbLyAHk0vXWAmo-L0xR&index=2&t=340s>. Diakses pada 11 Februari 2021, pukul 12.22